

MASALAH ETNISITAS DAN TATA RUANG DI INDONESIA

Hendro Prabowo¹, Agus Suparman²

¹*Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta*

²*Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Jl. Margonda Raya 100 Pondok Cina Depok*

¹*ndrahu@yahoo.com*

²*warish@plasa.com*

ABSTRAK

Wacana tentang keberadaan etnis dalam tata ruang merupakan suatu hal yang masih langka. Namun, dari beberapa sumber di kota-kota di negara-negara Eropa menunjukkan adanya perhatian pada masalah ini. Sebagaimana diketahui, kota-kota yang berkembang di Eropa Barat dilatarbelakangi dengan industrialisasi yang membawa konsekuensi pada kebutuhan tenaga kerja asing, yang berasal dari negara lain. Berbeda dengan Indonesia, kota-kota besar di Indonesia lebih banyak menarik perhatian penduduk berbagai wilayah. Sebaliknya, beberapa wilayah pedesaan di luar Jawa juga dijadikan tempat sebagai wilayah transmigrasi dari Jawa dan Bali. Akibatnya, kontak budaya antara penduduk asli dengan pendatang tidak dapat dihindarkan. Demikian pula konsekuensi secara spasial. Ada kecenderungan beberapa kelompok etnis tertentu mencoba mempertahankan identitas budayanya secara spasial, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dengan banyak belajar dari beberapa negara Eropa, paper ini mencoba membuka wacana tentang keberadaan etnis-etnis dan karakteristik spasialnya di Indonesia dewasa ini. Tiga wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini antara lain adalah: Jakarta dan Medan untuk wilayah perkotaan, dan Lampung untuk wilayah pedesaan.

Kata kunci: tata ruang, etnis, desa, kota

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Kota-kota di Eropa telah dicirikan percampuran penduduk oleh bermacam – macam etnis bangsa didunia. Fryer (dalam Van Kempen 2002), menemukan bahwa *cluster-cluster* orang Afrika dan India telah ada di kota-kota pelabuhan seperti London, Liverpool dan Cardiff. Kota selalu menjadi daya tarik karena memiliki banyak menjanjikan kehidupan yang lebih baik, diantaranya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan ketersediaan infrastruktur yang cukup, hingga kesenangan (*pull factor*).

Pada dekade 1950an, hingga 1970an, negara-negara di Eropa Barat mengalami pertumbuhan ekonomi cepat dampak dari industrialisasi sehingga sebagai konsekuensinya dibutuhkan tenaga kerja yang cukup besar, sedangkan tenaga lokal yang ada tidak mencukupi

kebutuhan. Impor tenaga kerja menjadi tak terhindarkan. Negara-negara Eropa bagian Selatan menjadi pilihan sebagai pekerja temporer di Eropa Barat. Motivasi awalnya mereka berhasrat untuk datang karena kondisi ekonomi di negaranya yang kurang menguntungkan, mereka inilah generasi pertama dari tenaga kerja pendatang, kemudian menjadikan negara keduanya.

Pada dekade tahun 1970an, negara-negara penerima migran seperti Spanyol, Portugal, Italia dan Yugoslavia juga mengalami peningkatan ekonomi yang juga berdampak pada kekurangan tenaga kerja, kondisi ini menjadikannya daya tarik bagi pekerja asal Maroko dan Turki. Pada saat yang sama, beberapa kelompok mulai bermigrasi, khususnya orang-orang yang berasal dari bekas negara jajahan, seperti orang Aljazair ke Perancis,

orang Suriname ke Belanda serta orang dari Pakistan dan India ke Inggris. Pengungsi dan pencari suaka menambah jumlah imigran di hampir semua negara di Eropa.

Keadaan ekonomi dan fasilitas pendidikan menjadi pertimbangan utama bagi pekerja migran, karena negara baru tentu lebih baik dari tanah airnya, sehingga banyak dari mereka memutuskan tinggal dan membawa keluarganya. Kondisi ini pada dekade 1970an, telah mengalami komposisi etnis yang beragam sehingga masyarakat multikultur juga tak terhundarkan sebagai konsekuensinya. Hal ini khususnya terjadi di kota-kota industri di Eropa seperti Amsterdam, The Hague, Brussels, London, Birmingham, Cologne, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, dan Vienna. Bagaimana kondisi perumahan para migran di Eropa?

Pada umumnya, minoritas etnis pendatang terkonsentrasi sebagai penyewa. Hanya dalam jumlah kecil di antara mereka yang dapat memiliki rumah. Contohnya etnis bangsa Turki di Denmark dan Belanda, 92% orang Turki adalah penyewa, di Swedia dan Düsseldorf (Jerman) jumlahnya dapat menca-pai 98%. Sementara di Belgia dan Perancis, 85% dari orang Turki adalah penyewa. Pola ini adalah konsekuensi dari pendapatan mereka (Van Kempen dan Özükren dalam Van Kempen 2002).

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tempat tinggal mereka adalah penyewa(tidak hak milik), serta berpola tidak berkoloni membentuk kloster-kloster tertentu, namun bercampur dengan masyarakat domestik-nya. Dengan demikian, keberadaan kelompok etnis sebagai bagian dari industrialisasi di kota-kota di Eropa sejak awal sudah direncanakan, bahkan termasuk tata ruang di dalamnya. Dalam kaitannya dengan penanganan dalam bidang perumahan, nampaknya strategi *integrasi* lebih banyak diterapkan dibandingkan dengan *segregasi*?

Bagaimana dengan Indonesia?

Kota-kota kolonial umumnya dibagi menjadi dua bidang yakni pribumi dan asing. Namun berbeda situasi kolonial di Indonesia, hal ini karena keberadaan Cina(datang lebih awal), sehingga kota-kota kolonial di Indone-sia

umumnya dibagi menjadi tiga kelas: Eropa, Cina, dan pribumi (Nas, 1997).

Sebelumnya pada abad ke-14, diaspora Cina mulai mengalir ke Asia Tenggara. *Entrepot* (pergudangan) telah banyak berkembang di wilayah pesisir Asia Tenggara. Beberapa kota telah memiliki dua wilayah yaitu permukiman orang Cina dan permukiman pribumi dengan keraton. Kedua permukiman ini dipisahkan oleh sungai sekaligus berfungsi sebagai pasar dan pelabuhan (Widodo, 1996).

Kolonisasi Eropa di Asia Tenggara diawali dibangunnya pelabuhan dekat dengan kota-kota yang telah ada pada awal abad ke-16. Pelabuhan tersebut menjadi strategis karena dekat dengan pelabuhan lama, pasar, dan muara sungai. Sementara permukiman Cina yang terkoneksi dengan pribumi sudah ada sebelumnya. Orang Cina adalah pemain ekonomi domestik yang dominan, sehingga lalu bersimbiosis mutualisma dengan pedagang Eropa. Akibatnya pelabuhan kecil lalu berkembang menjadi benteng bahkan benteng pertahanan (Widodo, 1996).

Pada abad ke-19, dilatarbelakangi oleh berkembangnya sektor perdagangan dan dalam rangka mengontrol peran ekonomi terutama Cina, maka kebijakan segregasi diberlakukan. Akibatnya, kota-kota kolonial di Asia Tenggara umumnya dibagi menjadi tiga kelas: Eropa, Cina dan orang asing lainnya, dan penduduk pribumi (Widodo, 1996; Nas, 1997; Sinulingga, 1999).

Pada permulaan abad ke-19 juga telah ditemukan adanya pengelompokan penduduk yang terpusat di Pulau Jawa. Hal ini penyebab terjadinya gejala kelebihan penduduk di Pulau Jawa, seperti diungkapkan oleh Thomas Raffles penguasa Inggris di Jawa tahun 1914. Hampir tiga perempat seluruh penduduk pulau Jawa terdiri dari orang Jawa, sisanya adalah orang Sunda, Madura, dan Betawi. Sebaliknya, komposisi etnis di luar pulau Jawa sangat heterogen, dari segi suku bangsa (kelompok etnis) pribumi maupun orang asing (Cina dan India). Du Bus de Gisignies (dalam Mantra, 2002) dalam tahun 1927 telah mencetuskan masalah kelebihan penduduk yang ada di Jawa. Dia berpendapat, apabila seluruh tanah di Jawa

telah dibuka, pada suatu ketika tanah itu akan penuh dengan manusia. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa yang disebut dengan program kolonisasi. Diharapkan akan dapat mengurangi kepadatan dan kelebihan penduduk di Jawa, program kolonisasi ini lebih ditekankan pada penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya di Jawa, di desa-desa baru yang disebut koloni di daerah-daerah kosong di luar Jawa.

Menurut Mantra (2002), pada saat itu pemerintah Hindia Belanda sebenarnya tidak berpengalaman dalam pelaksanaan kolonisasi, karena itu diperlukan beberapa eksperimen. Namun demikian, dengan adanya kritik pedas terhadap kebijaksanaan pemerintah oleh Van Deventer pada tahun 1899, maka pada tahun 1905 dimulailah pelaksanaan program kolonisasi. Beberapa petani dari Jawa dikolonisasikan ke Lampung, diikuti dengan wilayah lain seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan, dan Sulawesi.

Namun, jumlah penduduk Pulau Jawa yang mampu dipindahkan pada masa kolonisasi (1905-1941) sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Contohnya, jumlah penduduk Pulau Jawa pada tahun 1905 sebesar 29.924.000 jiwa, dan pada tahun 1940

jumlahnya meningkat menjadi 49.024.000 jiwa. Jadi selama 30 tahun terjadi pertambahan penduduk sebesar 19.100.000 jiwa orang, sedang jumlah penduduk yang mampu dipindahkan hanya sebesar 257.313 orang (1,3% dari jumlah pertumbuhan penduduk) (Mantra, 2002).

Baik pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia sama-sama menyadari pentingnya program redistribusi penduduk ini. Di samping itu, beberapa suku bangsa (*ethnic group*) telah pula melaksanakan usaha redistribusi penduduk ini. Fenomena ini lalu dikenal dengan istilah diaspora, seperti Cina (Mackie dalam Reid, 1996), Bugis, Makasar (Scholz 1983 dalam Manshard dan Morgan, 1988), Bajau, Buton (Hidayah, 1996), Melayu, Minangkabau, dan Batak. Keberadaan kelompok-kelompok etnis ini sebagai suku bangsa pendatang sudah ada jauh sebelum era kolonial.

Tanpa dibekali dengan pengetahuan etnis lainnya, adanya transmigrasi dan diaspora juga menyebabkan pemetaan kelompok etnis menjadi semakin rumit baik di Jawa maupun luar Jawa. Akibatnya, beberapa wilayah provinsi dan kota-kota di Indonesia menjadi wilayah masyarakat multikultur. Namun, samakah kondisinya dengan kota-kota di Eropa?



Gambar 1. Proses kolonisasi beserta propaganda iklan pada tahun 1930-an

2. MASYARAKAT MULTIKULTUR DI INDONESIA

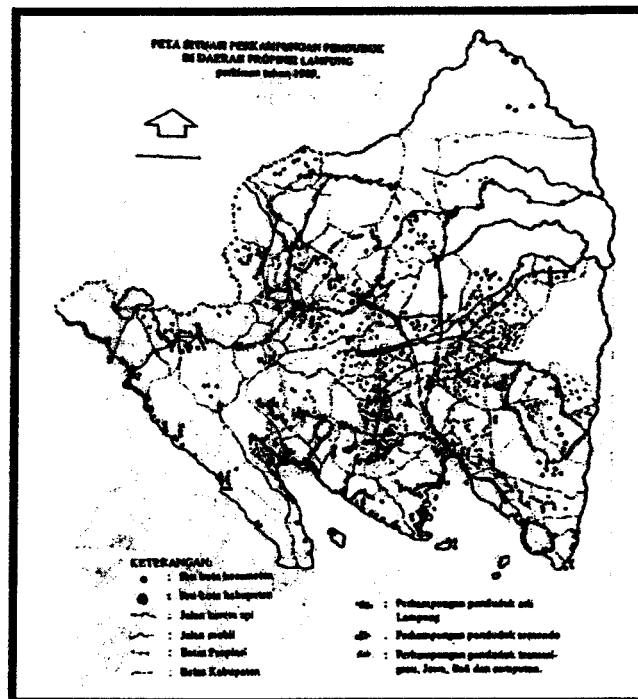
Tidak dapat dipungkiri lagi, hampir semua wilayah (termasuk kota) di Indonesia adalah wilayah dengan masyarakat multikultur. Para transmigran tentu lebih jelas motivasinya, yaitu mendapatkan tanah dan pekerjaan yang lebih baik di luar Jawa dan Bali. Namun, kelompok etnis diaspora yang terdiri dari beberapa kelompok etnis tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Para pendatang tersebut (transmigran, diaspora, dan migrasi lainnya) mau tidak mau harus melakukan kontak budaya dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan teori kultur dominan dari Bruner (dalam Warnen, 2001), masyarakat multikultur di Indonesia dalam lingkup provinsi dapat dikategorikan menjadi empat (Prabowo & Fakhurrozi, 2004):

1. Kelompok etnis tertentu menjadi dominan di wilayah teritorialnya
Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah lima provinsi di Jawa (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat), Bali, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nangroe Aceh Darusalam
2. Kelompok etnis tertentu menjadi dominan di luar wilayah teritorialnya
Untuk kategori ini hanya terjadi di propinsi Lampung, dimana orang Jawa menjadi mayoritas (61,89%) diikuti dengan Orang asli Lampung (Peminggir, Pepadun, Abang Bunga Mayang) justru menjadi minoritas.
3. Beberapa etnis memiliki jumlah yang berimbang, dapat dikategorikan lagi menjadi:
 - a. Perimbangan jumlah etnis dengan jumlah etnis asli lebih besar
Kategori ini kebanyakan berasal dari etnis diaspora seperti Batak, Bugis, Melayu, Minahasa, dan Buton di

wilayah teritorialnya. Selain itu, etnis Banten juga paling banyak jumlahnya meskipun tidak dominan. Beberapa provinsi yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah: Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

- b. Perimbangan jumlah etnis dengan jumlah etnis pendatang lebih besar
Kategori ini kebanyakan terjadi di wilayah dimana para pendatang yang justru "membangun" wilayah di perantaraan, terutama DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu. Di ketiga propinsi ini orang Jawa merupakan etnis yang jumlahnya terbesar.
4. Beberapa etnis memiliki jumlah yang berimbang, namun yang terbanyak adalah kumpulan beberapa etnis (kelompok lain-lain)
Yang menarik dalam kategori ini adalah keempat wilayah yang termasuk di dalamnya adalah wilayah-wilayah yang dikenal sebagai daerah konflik, yaitu: Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah.
Bagaimana kondisi perumahan para migran di Indonesia yang multikultur? Jawabannya tentu senjang dengan kota-kota di Eropa. Tidak ada kebijakan tertentu yang mengatur para pendatang dalam memenuhi kebutuhan papannya, kecuali bagi para transmigran. Meskipun, para transmigran mendapatkan permukiman namun tidak jelas kebijakan yang diambil: segregasi atau integrasi. Oleh karena itu, untuk memperjelas kondisi yang ada berikut ini disajikan tiga wilayah yang menggambarkan dinamika kontak budaya, kultur dominan, dan perilaku keruangan (*spatial behavior*) antara penduduk asli dan pendatang.



Gambar 1. Aglomerasi Permukiman Transmigrasi di Lampung

Lampung

Orang Jawa di propinsi Lampung ternyata jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan orang Jawa di DIY. Hasil penelitian Rahardjo dan Herliswanny (1998) di Jabung. Jabung adalah wilayah Lampung pedesaan, dimana banyak terdapat transmigran dari Jawa. Sebagaimana kita ketahui, Lampung adalah propinsi yang pertama menerima transmigran (Jawa dan Bali). Akibatnya jumlah orang Jawa di Lampung pada umumnya dan Jabung pada khususnya adalah mayoritas. Akibat kontak budaya dari tiga kelompok etnis (Jawa, Bali, dan Lampung) dapat diamati dalam hal penggunaan bahasa antar kelompok etnis.

Dalam penggunaan bahasa, di antara orang Lampung sudah jarang menggunakan bahasa Lampung, sementara di antara orang Jawa dan Bali sendiri masih menggunakan bahasa asalnya. Namun, dalam berinteraksi antar kelompok etnis bahasa Jawa cenderung lebih banyak digunakan. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa kultur dominan dapat pula terjadi pada kelompok etnis di luar wilayah teritorialnya sendiri. Penduduk pribumi justru

harus menyesuaikan diri dengan kelompok etnis lain yang dominan.

Bagaimana orang Lampung asli mempertahankan identitas etnisnya? Menurut Levang (2003) orang Lampung dapat menjaga identitasnya. Walaupun tergolong minoritas, mereka berperan utama dalam jajaran pemerintah daerah. Banyak desa yang mayoritas penduduknya Jawa memilih kepala desa orang Lampung untuk menyelesaikan sengketa tanah. Pejabat, anggota DPRD, dan pengadilan juga didominasi penduduk asli. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 1985, dari 76 kecamatan, 67 di antaranya dipimpin oleh orang Lampung asli.

Tata Ruang

Dari segi keruangan, ada kecenderungan yang menarik antara masyarakat asli Lampung dengan transmigran pendatang. Orang Lampung asli umumnya mempertahankan identitas keruangan mereka dengan aglomerasi permukiman yang berada di koridor-koridor jalan, sementara para transmigran umumnya berada di wilayah belakang.

Medan

Hasil penelitian Bruner pada periode 1957-1958 dan 1969-1971 (dalam Warnaen, 2001) tentang bagaimana orang Batak yang tinggal di kota Medan memang berkaitan dengan kultur dominan. Medan adalah kota yang bebas dari kultur dominan. Di kota Medan, hubungan antar warga dari berbagai kelompok etnis yang berlainan cenderung tegang, saling curiga, dan berdasarkan pada stereotype etnis. Di Medan, pengelompokan etnis sangat tajam dan warga setiap kelompok etnis cenderung bersatu. Di Medan, tidak satupun kelompok etnis yang jumlahnya mayoritas, sehingga tidak ada aturan yang dianut umum bagi berbagai kelompok etnis dalam berinteraksi.

Semula kota Medan merupakan sebuah kampung kecil bernama "Medan Putri". Perkembangan Kampung "Medan Putri" tidak terlepas dari posisinya yang strategis karena terletak di pertemuan sungai Deli dan sungai Babura. Pesatnya perkembangan Kampung "Medan Putri", juga tidak terlepas dari perkebunan tembakau yang sangat terkenal dengan tembakau Delinya, yang merupakan tembakau terbaik untuk pembungkus cerutu. Pada tahun 1863, Sultan Deli memberikan kepada perusahaan Belanda tanah seluas 4.000 bahu (1 bahu = 0,74 ha). Hasil contoh panen lalu dikirim ke Rotterdam di Belanda, untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau tersebut sangat baik dan berkualitas tinggi untuk pembungkus cerutu.

Kemudian di tahun 1866, pengusaha Belanda lainnya melakukan ekspansi perkebunan baru di daerah Martubung, Sunggal (1869), Sungai Beras dan Klumpang (1875), sehingga jumlahnya mencapai 22 perusahaan perkebunan pada tahun 1874. Mengingat kegiatan perdagangan tembakau yang sudah

sangat luas dan berkembang, perusahaan tersebut memindahkan kantor perusahaannya dari Labuhan ke Kampung "Medan Putri". Dengan demikian "Kampung Medan Putri" menjadi semakin ramai dan selanjutnya berkembang dengan nama yang lebih dikenal sebagai "Kota Medan".

Dalam pengembangan perkebunan, pemerintah Belanda memakai kebijakan "pintu terbuka" dengan mendatangkan buruh dari luar, termasuk luar negeri. Mereka tidak mempercayai tenaga kerja lokal (orang Melayu, Karo, Simalungun) karena dianggap malas dan tidak dapat dipercaya (Pelly, 1998).

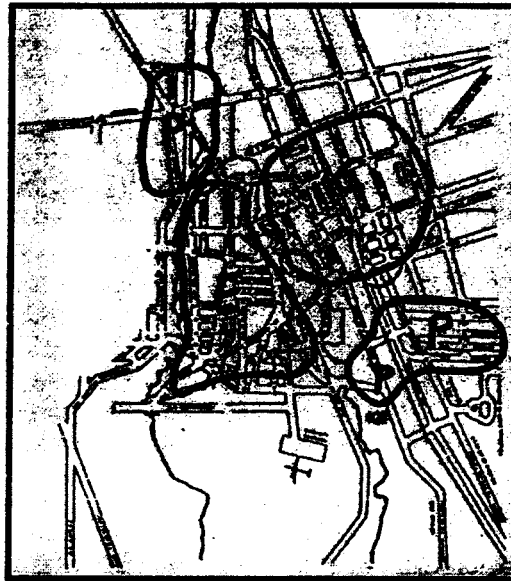
Pada tahun 1870-an didatangkan orang-orang Cina dari Penang dan Singapura. Mereka tidak terlalu berhasil di perkebunan, namun kebanyakan tidak meninggalkan Sumatera Timur. Pada dekade yang sama, didatangkan pula orang Jawa dan Banjar oleh pemerintah Belanda. Hal ini diikuti pula oleh kedatangan orang Minangkabau dan Mandailing.

Pada tahun 1920, telah dapat diidentifikasi terdapat beberapa kelompok etnis di Sumatera Timur, seperti: Indonesia (Melayu, Batak Karo, Batak Sumalungun, Batak Mandailing, Jawa, Sunda, Banjar, dan Minangkabau), Cina, Eropa, Asia Luar, Arab (Milone dalam Pelly, 1998).

Tata Ruang

Sama halnya dengan pola permukiman kota kolonial di Indonesia kota Medan terdiri dari tiga kelas utama yaitu:

1. *Europese Wijk*, yaitu lingkungan permukiman yang khusus ditempati penduduk golongan Eropa
2. *Chinese Wijk*, yaitu lingkungan permukiman yang ditempati orang-orang Cina saja.
3. Lingkungan permukiman (perkampungan), yang khusus ditempati penduduk pribumi.



Gambar 2. Kebijakan Segregasi Kota Medan di Era Kolonial

Bagaimana kondisi kota Medan jika dikaitkan dengan para pendatang terutama Cina, Minangkabau dan Mandailing?

Tidak didapat berapa jumlah orang Cina, Minangkabau dan Mandailing. Namun dari kecenderungan dimana mereka tinggal, Usman Pelly (1998) menemukan bahwa terdapat kecenderungan dari ketiga kelompok etnis tersebut untuk tinggal di dekat pasar. Berdasarkan peta yang dikembangkan Usman Pelly memang belum dapat ditentukan apakah aglomerasi permukiman mereka masih sesuai dengan segregasi di era kolonial.

Jakarta

Seperti halnya Medan, di Jakarta tidak terdapat kultur lokal yang dominan. Etnis Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta bukan merupakan kultur dominan. Sebaliknya, kultur Betawi menghadapi “serangan” dari berbagai etnis pendatang, sehingga sering dikatakan, kultur Betawi terancam mengalami kepu-

nahan. Karena itu, tidak mengherankan jika MT Arifin (1999 dalam Incis, 2004) mengkhawatirkan, beberapa kelompok etnis di Jakarta akan mengaktifkan solidaritas etnis. Mereka mengelompok dalam berbagai kelompok etnis dengan orientasi etnisitas yang cukup tinggi, cenderung eksklusif, dan memiliki stereotip terhadap kelompok lain. Yang menarik ialah: persaingan antarkelompok etnis dan orientasi etnisitas merupakan faktor potensial bagi terjadinya konflik antar kelompok etnis di Jakarta.

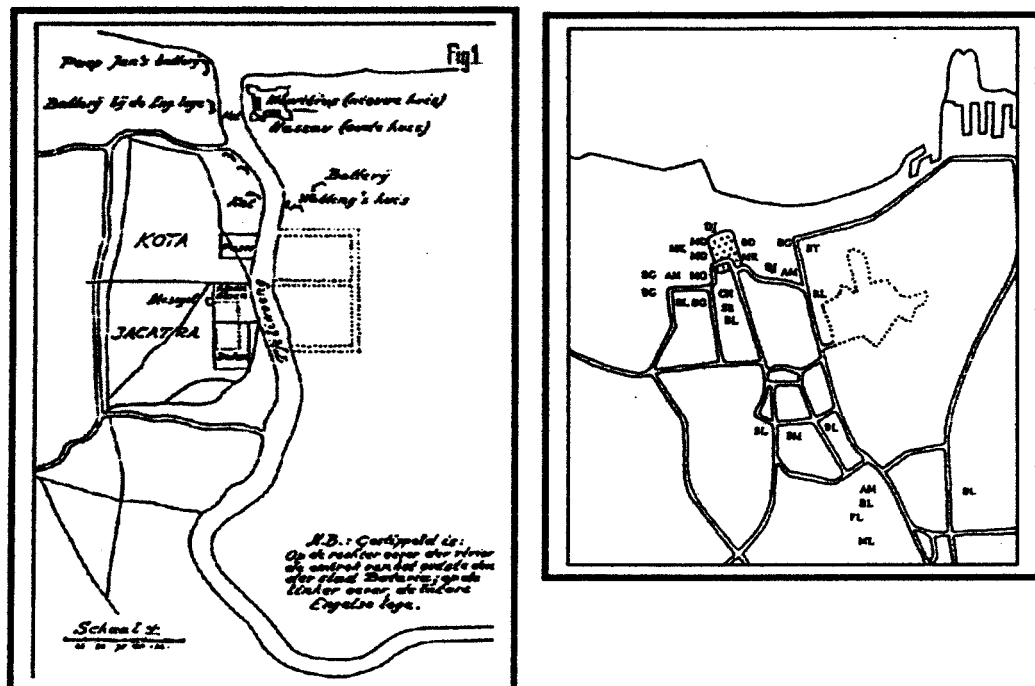
Beberapa ahli yakin bahwa orang Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain (*melting pot*) yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Ambon, Arab, Bali, Banda, Bugis, Bima, Bali, Buton, Flores, Jawa, Melayu, Sunda, dan Sumbawa. Antropolog Universitas Indonesia, Dr Yasmine Zaki Shahab MA menaksir, etnis Betawi baru terbentuk sekitar seabad lalu, antara tahun 1815-1893.



1. *Betawi Tengah*, mendiami wilayah sekitar Gambir, Menteng, Senen, Kemayoran, Sawah Besar, dan Taman Sari.
2. *Betawi Pinggir*, mendiami wilayah sekitar Pasar Rebo, Pasar Minggu, Pulo Gadung, Jatinegara, Kebayoran, dan Mampang Prapatan.
3. *Betawi Udik*, mendiami kawasan sekitar Cengkareng, Tangerang, Batu Ceper, Cileduk, Ciputat, Sawangan, Cimanggis, Pondok Gede, Bekasi, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Cilandak, Kramat Jati, dan Cakung
4. *Betawi Pesisir*, mendiami wilayah sekitar Teluk Naga, Mauk, Japad, Tanjung Priok, Marunda, Kalapa, dan Kepulauan Seribu.

1. mereka yang dipengaruhi kebudayaan Cina, tinggal di bagian utara dan barat Jakarta, serta Tangerang
2. mereka yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Sunda, tinggal di sebelah timur dan selatan Jakarta, Bekasi serta Bogor. Dari segi dialek, mereka dikenal dengan sebutan Betawi Ora, yang memiliki ciri akhir kata yang berhuruf "a" menjadi "ah", misalnya "saya" menjadi "sayah".

Setelah ditetapkan sebagai ibukota negara pasca kemerdekaan RI, maka migrasi penduduk dari wilayah lain tidak dapat dipungkiri. Hal ini membuat etnis Betawi menjadi semakin terdesak dan jumlahnya juga mengalami penurunan. Orang Betawi Tengah, Pinggir, Udik maupun Pesisir mulai hidup bersama dengan para pendatang. Perhatikan tabel berikut.



Gambar 4. Batavia pada Tahun 1619 dan Segregasi Etnis pada Abad ke-18 dan 19
Sumber : Nas (1997), Muhadjir (1986)

Tabel 1. Jumlah Orang Betawi dan Rasio dengan Etnis Lainnya

Tahun	Jumlah Orang Betawi	Jumlah Etnis Lain	Rasio
1930	778.953	438.161	64% : 36%
1961	655.400	2.862.008	22,9% : 77,1%*

Keterangan:

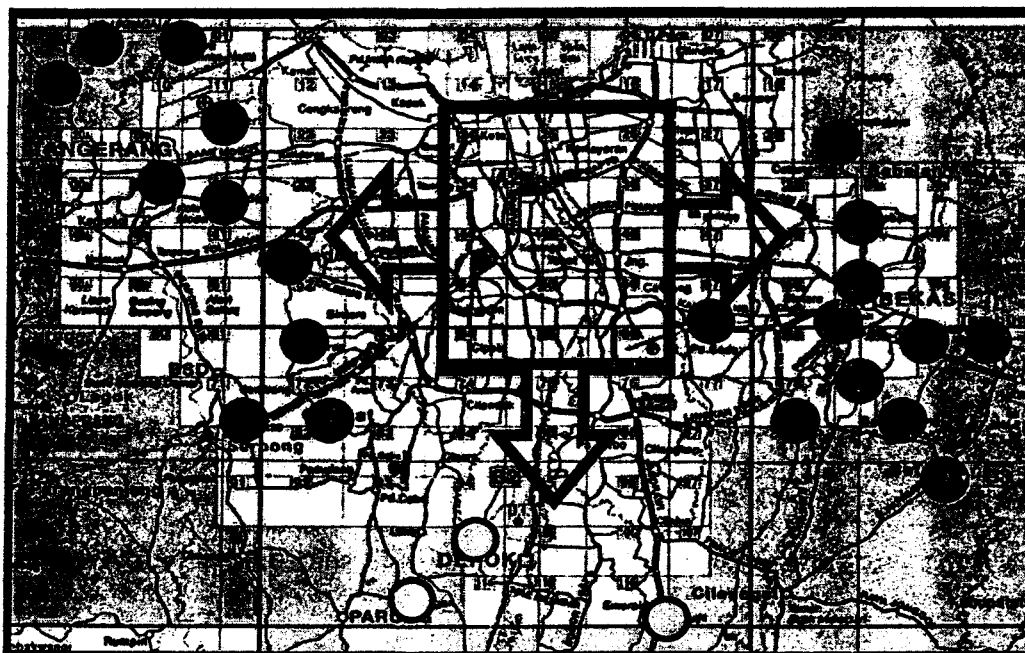
Sumber: Siswantari (2000)

* etnis yang dominan adalah Sunda (32,8%) dan Jawa (25,4%)

Kota Jakarta dewasa ini telah banyak berubah. Sebagaimana pada bagian terdahulu, para pendatang justru lebih banyak jumlahnya. Secara terinci, beberapa kelompok etnis yang menghuni kota Jakarta antara lain adalah: Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Lainnya (6,48%), Cina (5,53%), Batak (3,61%),

Minangkabau (3,18%), Melayu (1,62%), Bugis (0,59%), Madura (0,57%), Banten (0,25%), dan Banjar (0,10%).

Berdasarkan sensus tahun 1930 dan 2000, sebenarnya orang Betawi mengalami peningkatan lima kali lipat dari 980.863 menjadi 5.041.688 jiwa atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,34%. Jadi, salah jika kita beranggapan bahwa jumlah orang Betawi berkurang. Hanya saja jumlah orang Betawi di Jakarta tinggal 45,65%, selebihnya mereka umumnya kini tinggal di wilayah propinsi Banten dan Jawa Barat. Wilayah Banten meliputi Tangerang, sedangkan wilayah Jawa Barat meliputi Depok, Bogor, Bekasi, dan Karawang. Sebenarnya, di wilayah-wilayah inilah sudah terdapat orang Betawi sebelumnya.



Gambar 5. Wilayah Baru Orang Betawi

3. KESIMPULAN

Bahwa masalah etnisitas bermotiv ekonomi sangat kuat dan berpengaruh terhadap tata ruang, setiap Dominasi etnis selalu berdampak pada spasial.

Kota semakin besar cenderung jumlah etnis yang semakin besar pula dan pola – pola *cluster* semakin bergeser pada heterogenitas baik secara etnis maupun spasial.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.Reid, *Sojourners and Settlers: Histories of Southeast Asia and the Chinese*. New South Wales: Allyn and Unwin, 1996.
- [2] B.D. Sinulingga, *Pembangunan Kota: Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- [3] Ginacom, *Sejarah Indonesia*, <http://www.ginacom/sejarah/sejarah01.shtml>, 2004.
- [4] H. Prabowo & M. Fakhurrozi, Belajar dari Kekerasan Sosial Masa Lalu untuk Menjadi Manusia Indonesia Masa Depan, Seminar Nasional “Menjadi Manusia Indonesia”, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta, 24-25 Juli 2004
- [5] I. B, Mantra, Persebaran Penduduk Dan Kebijaksanaannya Di Indonesia *Jurnal Studi Indonesia* (ISSN 1410-2099), <http://202.159.18.43/jsi/3idaba.htm>, 2002
- [6] Incis (Indonesian Institute for Civil Society), Riset Antar-Etnik dan Masalah Kebangsaan, Dalam <http://www.incis.or.id>, 2003.
- [7] J. Widodo, The Urban History of The Southeast Asian Coastal Cities, Abstract from PhD Dissertatio, February 1996, <http://www.iis.utokyo.ac.jp/~fujimori/myhomepage/phd.html>
- [8] L. Suryadinata, E.N. Arifin, & A. Ananta, *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES, 2003.

- [9] M.Z. Tadjoeidin, Database Social Violence in Indonesia 1990-2001. Jakarta: United Nations Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIR). Dalam www.communalconflict.com. atau www.unsfir.or.id, 2002.
- [10] Muhadjir, Multamia, R. Ali, , & R. Ruchiat, *Map of Betawi's Cultural Art*. Jakarta: The Cultural Service of DKI Jakarta, 1986.
- [11] P. J.M. Nas, *The Colonial City*, Leiden: University of Leiden, 1997.
- [12] P. Levang, *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: KPG, 2003.
- [13] R van Kempen, Migration, segregation and housing in Western European Cities, Paper for the Eurex-seminar, http://www.uniurb.it/istsoc_old/wwwroot/eurex/syllabus/lecture8/Eurex-van-kempen-2002.doc, 2002.
- [14] S. Warnaen, *Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- [15] T. N. Pudjiastuti, Migration and Conflict in Indonesia. Makalah dalam Regional Population Conference. Dalam <http://www.iussp.org/Bangkok2002/S15Pudjiastuti.pdf>, 2002.
- [16] U. Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- [17] W.Manshard, dan W.B. Morgan, Agricultural Expansion and Pioneer Settlements in the Humid Tropics. The United Nations University. Dalam <http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/80636e/80636E00.htm#Contents>, 1988.
- [18] Z. Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1996.